

**BPK**

## Surati Kepala Daerah

**BADAN** Pemeriksa Keuangan Perwakilan Kalbar telah mengirim surat kepada pemerintah kabupaten dan kota serta provinsi untuk menyerahkan laporan keuangan. Sebagai upaya mengingatkan agar tidak terlambat memberikan laporan sebagai bentuk kepatuhan dengan aturan. Meski lambat menyerahkan, BPK tidak dapat memberikan sanksi.

“Sudah menyurati semua kepala daerah untuk tepat waktu menyerahkan laporan keuangan. Tapi belum ada respon. Penyerahan paling lambat per 31 Maret. Terhitung sejak tiga bulan anggaran berlangsung,” kata Hernold Ferry Maharibay, Kepala Sub Auditor Region BPK RI Perwakilan Kalbar di Pontianak, kemarin.

Mengenai kepatuhan penyerahan laporan keuangan termaktub dalam dua aturan. Yakni UU Nomor 21/2009 dan UU Nomor 17/2003 tentang keuangan negara. BPK telah siap menerima

◆ Ke Halaman 23 kolom 1

## Surati Kepala Daerah

**Sambungan dari halaman 17**

laporan keuangan semua kabupaten/kota. Namun laporan yang ditunggu belum masuk. Tetapi toleransi diberikan hingga penghujung tiga bulan anggaran berjalan.

Menurut Hernol, beberapa daerah telah menyatakan kesiapan untuk tepat waktu menyerahkan laporan keuangan. Diantaranya Sintang, Melawi, Kapuas Hulu dan Kubu

Raya, Kabupaten Pontianak dan kota Singkawang sudah memberikan konfirmasi. Merencanakan dapat menepati tenggang waktu sesuai aturan yang berlaku. “Kita menunggu realisasinya,” kata Hernold.

Laporan keuangan yang diserahkan pada 2011 adalah penggunaan keuangan pada 2010. Hernold menyebut pada 2010 beberapa daerah melewati batas waktu yang ditetapkan menyerahkan

laporan keuangan. Hingga batas toleransi yang diberikan yakni sampai April.

Hernold merinci paling akhir menyerahkan laporan 2009 kepada BPK pada 2010 yakni Kabupaten Landak, Juni 2010. Pada Mei sebanyak dua kabupaten, Sekadau dan kota Singkawang. Sedang April meliputi Sambas, Ketapang, Melawi, Kapuas Hulu, Kayong Utara, Sintang dan Pemprov. Hanya lima kabupaten

yang mampu menyerahkan laporan tepat waktu, bulan Maret. Kelima Kabupaten itu yaitu Kabupaten Pontianak, Bengkayang, Sanggau, Kubu Raya dan Kota Pontianak.

“Kita tentunya sangat mengharapkan semua daerah dapat tepat waktu menyerahkan laporan. Surat yang dikirim semata ditujukan buat motivasi agar daerah dapat mematuhi aturan yang ada,” kata Hernold. (stm)